

Total 22 Desa Hilang

Dari Halaman 1

Ia mengatakan, jumlah tertinggi dari keseluruhan kantor desa terdampak itu terletak di Aceh hingga 1.455, lalu Sumut 93, dan Sumbar 32 unit.

"Artinya, desanya enggak jalan pemerintahannya," ucapnya.

Ancam Kerahkan Massa Demo Lebih Banyak

Dari Halaman 1

Iqbal menegaskan, aksi demonstrasi hari ini merupakan aksi awal atau peringatan. Ia memastikan buruh akan kembali turun ke jalan pada awal Januari 2026 jika tuntutan mereka tidak direspon.

"Ini aksinya hanya aksi awalan. Nanti kita akan aksi lagi di awal-awal Januari," ujarnya.

Iqbal menjelaskan, terdapat dua tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut. Pertama, buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026. Kedua, mendesak Gubernur DKI Jakarta segera mengesahkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026.

Menurutnya, alasan utama penolakan buruh adalah penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta. Ia menilai angka tersebut

Tito memastikan pemerintah takkan tinggal diam dalam menangani bencana ini. Ia menyampaikan sejak telah menerjunkan sembilan tim dalam membantu warga terdampak mengurus dokumen kependudukan mereka yang hilang.

"Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, ada juga akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain yang diperlukan di dalam data itu,"

ujarnya.

Selain itu, Tito menyebut Kemendagri juga berencana mengirimkan sekitar 1.054 Praja IPDN untuk membantu warga terdampak di lokasi bencana mulai 3 Januari 2026 pekan depan.

"Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara," ucap dia.(cnni/js)

Buruh Demo Tuntut Revisi UMP

Dari Halaman 1

butuhan Hidup Layak (KHL).

"Tuntutan aksi pada hari ini ada dua. Yang pertama, ubah atau revisi UMSP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta, yaitu 100 persen KHL. Dan tetapkan UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta 2026, sekurang-kurangnya 5 persen di atas KHL yang 100 persen tadi," ujar Said Iqbal saat berorasi.

Tuntutan kedua, lanjut Iqbal, adalah meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 daerah yang sebelumnya dihapus. Ia menyebut kebijakan tersebut seharusnya mengikuti rekomendasi para bupati dan wali kota setempat.

1.392 Aparat Disiagakan Kawal Demo Buruh di Jakarta Pusat Hari Ini

Pramono Anung Respons Buruh Demo Besar Tolak UMP Jakarta 2026

"Yang kedua, meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan 19 kabupaten/

kota UMSK-nya, sesuai rekomendasi bupati dan wali kota. Termasuk juga di Jawa Timur dan DKI Jakarta. Ada juga Sumatera Utara," katanya.

Iqbal menegaskan, aksi demonstrasi hari ini merupakan aksi awal atau peringatan. KSPI dan Partai Buruh berencana kembali menggelar aksi lanjut pada awal Januari 2026.

"Ini aksinya hanya aksi awalan, aksi peringatan. Nanti kita akan aksi lagi di awal-awal Januari," ujarnya.

Selain itu, aksi buruh juga akan kembali digelar pada Selasa (30/12). Iqbal memperkirakan jumlah massa yang hadir bisa mencapai 20.000 orang.

"Rencana kami besok aksi lagi, sekitar 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir," tuturnya.

Iqbal menyebut penolakan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta menjadi alasan utama aksi tersebut. Menurutnya, angka itu lebih rendah dari nilai KHL yang telah ditetapkan Badan Pusat Statistik

(BPS).

"Pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta, karena Upah Minimum yang ditetapkan lebih rendah dari KHL yang diumumkan sendiri oleh BPS," katanya.

Menambahkan, upah minimum di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang justru lebih tinggi dibanding Jakarta.

"Upah Minimum di Bekasi dan Karawang sekitar Rp5,95 juta, jauh lebih tinggi dari UMP DKI Jakarta Rp5,73 juta. Apakah masuk akal?" ujarnya.

Terkait insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Iqbal menilai kebijakan tersebut tidak dapat mengantikannya punya upah minimum karena bersifat terbatas dan bergantung pada anggaran daerah.

"Saya ambil contoh pabrik di Cilincing dan Pulogadung. Dari 300 karyawan, yang menerima insentif hanya 15 orang atau sekitar 5 persen. Jadi insentif bukan bagian dari upah minimum, melainkan bantuan sosial," jelasnya. (cnni/js)

Prabowo Kirim Helikopter Pribadi

Dari Halaman 1

digunakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan bencana.

"Sejak minggu pertama bencana bapak presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh gubernur Aceh, beserta timnya, beserta keluarganya silahkan digunakan kemanapun berkeling Aceh itu sejak minggu pertama," kata Teddy di Lanud Halim Perdama Kusuma, Jakarta, Senin (29/12).

Teddy menyampaikan sejak hari pertama bencana, pemerintah telah memberikan upaya terbaiknya dalam penanganan di lokasi.

15 Ribu Ton Beras Sudah Dikirim ke Korban

Dari Halaman 1

tah (CBP) serta cadangan minyak goreng yang disalurkan melalui Perum Bulog.

"Untuk Aceh, bantuan hampir 15 ribu ton sudah dikirim, tepatnya 14.898 ton beras. Selain itu juga disalurkan 1,5 juta liter minyak goreng," kata Zulhas ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (29/12).

Selain Aceh, pemerintah juga menyalurkan bantuan ke Sumatra Utara. Zulhas menyebut jumlah beras yang dikirim ke provinsi tersebut mencapai hampir 20 ribu ton.

Kepemimpinan Tanpa Ilmu, Peradaban Tanpa Arah

Dari Halaman 1

etahuan sering ditempatkan sebagai pelengkap. Ilmu hadir setelah keputusan diambil, bukan sebagai penuntun sebelum langkah ditetapkan. Padahal, tanpa pengetahuan yang jernih, kekuasaan mudah berubah menjadi kehendak sepihak, dan kepemimpinan kehilangan orientasi moral serta tanggung jawab jangka panjang.

Al-Qur'an sejak awal meletakkan fondasi kepemimpinan manusia secara berbeda. Kisah penciptaan manusia tidak dimulai dengan penegasan otoritas atau kekuatan, melainkan dengan pengetahuan. Ketika Nabi Adam dia-mana peran sebagai khalifah di muka bumi, yang disebut pertama bukanlah kuasanya, tetapi kemampuannya memahami realitas. Adam diajarkan nama-nama, yakni pengetahuan tentang makna dan fungsi kehidupan yang akan ia kelola. Ilmu itulah yang mengangkat martabatnya dan menjadikannya layak memiliki amanah besar.

Pesan ini tegas: kepemimpinan sejak awal bukanlah soal menguasai, tetapi soal memahami. Ilmu bukan hadiah tambahan, melainkan syarat utama. Amanah diberikan bersamaan dengan pengetahuan agar manusia tidak berjalan dalam gelap. Ketika kepemimpinan terlepas dari ilmu, sesungguhnya yang terjadi adalah pengingkaran terhadap fondasi awal penciptaan manusia itu sendiri.

Ironisnya, semakin maju peradaban, semakin sering ilmu dipisahkan dari kekuasaan. Pengetahuan berlangsung pesat di ruang akademik dan

riset, tetapi kebijakan publik kerap ditentukan oleh kepentingan jangka pendek. Ilmu berbicara melalui data, kehati-hatian, dan proyeksi dampak, sementara kekuasaan sering melangkah dengan tergesa-gesa. Di sinilah letak kegelisahan manusia modern: bukan karena kekurangan pengetahuan, melainkan karena pengetahuan tidak lagi dijadikan penuntun utama.

Amanah sebagai khalifah sejatinya bukan mandat untuk menaklukkan, melainkan tanggung jawab untuk merawat. Merawat kehidupan, menjaga keseimbangan, dan membaca batas. Dalam konteks ini, ilmu berfungsi sebagai cahaya pembatas keserakahan. Tanpa pengetahuan, manusia mudah memperlakukan alam dan sesamanya sebagai objek. Dengan ilmu, manusia diingatkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang melampaui generasinya sendiri.

Al-Qur'an berulang kali mengingatkan bahwa keruntuhannya peradaban tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia retak perlamban ketika pengetahuan diabaikan dan peringatan tidak lagi dipedulikan. Kisah Nabi Yusuf, misalnya, menunjukkan bagaimana sebuah peradaban diselamatkan bukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh kemampuan membaca tanda-tanda zaman. Pengetahuan tentang mimpi diterjemahkan menjadi perencanaan. Masa subur dikelola, masa sulit dipersiapkan. Ilmu diubah menjadi kebijakan, dan kebijakan menyelamatkan banyak kehidupan.

Sebaliknya, kaum 'Ad dan Tsamud memiliki kekuatan fisik dan teknologi luar biasa pada masanya. Mereka mampu membangun dan me-

naklukkan alam, tetapi kehilangan kebijaksanaan. Pengetahuan digunakan untuk menegaskan kesombongan, bukan menjaga keseimbangan.

Peringatan dianggap gangguan, batas dipandang sebagai kelemahan. Ketika ilmu tidak disertai kesadaran moral, kekuatan justru mempercepat kejatuhan.

Kisah-kisah itu bukan sekadar cerita masa lalu. Ia terus berulang dengan wajah yang berbeda. Manusia modern memiliki teknologi canggih, data melimpah, dan akses pengetahuan yang luas. Namun pertanyaannya tetap sama: apakah semua itu digunakan untuk membaca masa depan, atau sekadar mempercepat kejatuhan hari ini? Ketika pengetahuan disisihkan dari pengambilan keputusan, peradaban runtuh bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena kehilangan arah.

Pada akhirnya, semua kembali pada amanah manusia sebagai khalifah. Sejak Adam, manusia tidak dibiarakan tanpa petunjuk. Ilmu diberikan agar kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang, agar pembangunan tidak mengorbankan masa depan, dan agar kepemimpinan tetap berada dalam batas tanggung jawab. Sejarah menunjukkan, yang hilang dari peradaban runtuh bukanlah kecerdasan, melainkan kesadaran untuk belajar dan mendengar peringatan.

Di tengah dunia yang bising oleh kepentingan dan percepitan, pertanyaan terpenting hari ini bukanlah seberapa besar kekuasaan yang kita miliki, melainkan seberapa jujur kita mau belajar. Sebab sejak awal penciptaan, kepemimpinan sejati selalu dimulai dari kerendahan hati untuk memahami.(*)

Ia mengaku telah menerima laporan langsung dari Direktur Utama Bulog terkait realisasi distribusi bantuan ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Itu pelaksanaannya dilakukan Bulog dan saya sudah mendapatkan laporan dari Dirut Bulog soal penanganan Aceh, Sumut dan Sumbar," tegaskan Zulhas.

Pemerintah, lanjut Zulhas, memastikan distribusi bantuan pangan bagi korban bencana di Sumatra akan terus dipantau agar tepat sasaran dan membantu meringankan beban masyarakat terdampak.(cnni/js)

Hukuman Pidana

Dari Halaman 1

Ia menjelaskan nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah terkait.

"Hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan," tuturnya.

Hukuman pidana kerja sosial ini tertuang dalam Pasal 65 huruf e KUHP yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) juga sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) untuk menyiapkan penerapan hukuman pidana kerja sosial untuk ancaman pidana yang kurang dari lima tahun penjara.(cnni/js)

Banjir Landa

Dari Halaman 1

gan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat menyebutkan bahwa luapan sungai mulai masuk ke rumah warga sekitar pukul 20.00 WIB.

Banjir kali ini merendam sedikitnya 308 rumah yang tersebar di Desa Citasuk dan Desa Kalumpang.

"Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan aliran Kali Cikalumpang kembali meluap dan masuk ke permukiman," katanya mengutip Antara, Senin (29/12).

Data BPBD menunjukkan dampak terparah berada di Desa Citasuk, mencakup Kampung Sukamaju dan Kampung Begog, serta Desa Kalumpang di Kampung Bayur dan Rancasumur. Tercatat sebanyak 350 kepala keluarga atau sekitar 1.200 jiwa terdampak oleh musibah rutin tahunan ini.

Satu Lansia Yewas

Ia menuturkan bahwa musibah banjir kali ini memakan satu korban jiwa, yakni seorang warga bernama Marto (60) asal Kampung Begog, Desa Citasuk.

Selain itu, sebanyak enam orang warga terpaksa mengungsi ke gedung SD Sukamaju karena kediannya mereka belum bisa di tempati.

Selain rumah tinggal, banjir juga merendam fasilitas umum, salah satunya Madrasah Diniyah Mathla'ul Anwar.

"Petugas kami telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi warga dan terus memantau pergerakan debat air sungai," tambah Ajat.

Hingga Senin pagi, tinggi muka air (TMA) di lokasi terdampak dilaporkan mulai menunjukkan tren menurun dan berada di kisaran 20 hingga 60 sentimeter. Meski air berangsur surut, sebagian besar warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga barang berharga.

Pihak BPBD bersama Polsek, Koramil, dan PMI Kabupaten Serang tetap bersiaga di lokasi guna mengantisipasi adanya kiriman air susulan, mengingat kondisi cuaca di wilayah Padarincang saat ini masih terpanca berawan. Sebelumnya banjir juga telah melanda Kecamatan Padarincang pada 17 Desember 2025.(cnni/js)



Hindari Kembang Api

Dari Halaman 1

(saling menolong) dan ukhuwah insaniyah menuntut kepekaan kolektif, terlebih ketika musibah merambah ruang hidup sebuah komunitas. Hilangnya desa bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan hilangnya memori, identitas, dan martabat sosial.

Di sinilah pembatalan kembang api menemukan maknanya. Ia menjadi bahasa empati negara. Dalam teori komunikasi simbolik, tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Ketika negara menahan pesta cahaya, ia sedang mengirim pesan: ada luka yang harus dihormati. Namun, pesan simbolik hanya bermakna jika dipahami dan dikomunikasikan dengan jujur kepada publik.

Masalahnya, empati sering kali berhenti pada simbol. Puluhan desa yang hilang menyingkap persoalan struktural yang selama ini diabaikan: tata kelola lingkungan yang abai, pembiaran alih fungsi lahan, serta mitigasi bencana yang lemah. Dalam kacamata agama, bencana tidak boleh semata dibaca sebagai takdir, tetapi juga sebagai akibat dari kelalaian manusia. Al-Qur'an mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah manusia sendiri.

Dari sudut pandang komunikasi publik, negara belum sepenuhnya berhasil menjelaskan tragedi ini secara utuh. Publik lebih banyak mendengar soal pembatalan perayaan, tetapi minim penjelasan tentang bagaimana desa-desa itu bisa lenyap, apa rencana pemulihannya, dan ke mana arah relokasi warganya. Komunikasi yang timpang seperti ini berisiko melahirkan empati semu: publik diminta ber